http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA Jurnal Ganec Swara Vol. 17, No.3, September 2023

ISSN 1978-0125 (*Print*); ISSN 2615-8116 (*Online*)



ANALISIS TINGKAT EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS UNTUK MENGUKUR KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN MBS DI SDN 2 POHGADING KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ERVIVA FARIANTIN1), ELVINA SETIAWATI2), ULFIYANI ASDIANSYURI3)

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amm Mataram

erviva65@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengukur kinerja sekolah yang sudah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Penelitian ini dilaksanakan di SDN 2 Pohgading dalam bentuk penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian dilakukan dengan mengukur kinerja pengelolaan keuangan pada SDN 2 Pohgading dengan pengukuran kinerja sektor publik yang ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektivitas. Pengukuran efisiensi yang berkaitan dengan kegunaan anggaran, sedangkan pengukuran efektivitas berhubungan dengan pencapaian target yang sesuai rencana. Sumber data diperoleh dari : Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Laporan Realisasi Anggaran Sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja pengelolaan keuangan Manajemen Berbasis Sekolah di SDN 2 Pohgading pada tahun 2014-2018 dalam bentuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam kategori baik. berdasarkan hasil penelitian dengan pengukuan kinerja sektor publik menunjukkan bahwa tingkat efisiensi yang dicapai pada tahun 2014-2018 adalah 100%, berdasarkan tabel kriteria efisiensi kinerja keuangan dalam kriteria yang kurang efisien atau efisien berimbang karena sama dengan 100%. Sedangkan dari tingkat efektivitas pada tahun 2014 mencapai 102,43%, dan tahun 2016 mencapai 100,18%. Berdasrakan tabel kriteria efektivitas kinerja keuangan dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2015, 2017 dan 2018 tingkat efektivitas mencapai 100%. Berdasrkan tabel kriteria efektivitas kinerja keuangan dalam kategori yang efektif.

Kata kunci: Tingkat Efisiensi, Efektivitas dan Kinerja Keuangan MBS.

ABSTRACT

The research aims to analyze and measure a school performance that has applied school based management (MBS). The study was conducted at SDN 2 Pohgading through descriptive quantitative. The study was conducted through measuring the finance management performance at SDN 2 Pohgading through the measurement of public sector observed from efficiency and effectiveness level. The efficiency measurement is related to estimate purpose meanwhile the effectiveness measurement is related to the target achievement that appropriate with the plan. Data resources gained from: Activity plans and school estimate (RKAS) and realization school estimate report. The results of this study indicates that finance management of school based management performance at SDN 2 Pohgading in 2014-2018 in from of school operational fun aid (BOS) is considered fine. Based on the results of the study through measuring public sector performance indicates that efficiency level reached is 100% in 2014-2018. Based on the table of finance efficiency performance criteria, it is inefficient or equilibrate efficient because it is equal to 100%. However, from the effectiveness level in 2014 it reached 102,43% and in 2016 it reached 100,18%. Based on the finance effectiveness performance criteria is categorized very effective. In 2015, 2017 and 2018 the level of effectiveness reached 100%. Based on the table of finance effectiveness performance criteria is categorized effective.

Keyword: Efficiency, Effectiveness Rate and Finance management performance, MBS,

PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian suatu negara akan berdampak pada berbagai factor salah satunya adalah lajunya sebuah Pendidikan. Keberlanjutan pendidikan juga akan tergantung pada bagaimana pemerintah menentukan kebijakan pembayaran. Selain itu apabila pemerintah mengalami ketidakstabilan mengelolah perekonomian, maka akan berpengaruh terhadap sumber pembiayaan pendidikan sehingga akan menghambat proses belajar mengajar.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Rohiat (2010) Pendidikan membutuhkan biaya yang banyak. Sudah menjadi rahasia umum, pendidikan yang berkulitas itu mahal. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan atau sekolah menjadi faktor yang sangat penting untuk menunjang terselenggaranya proses pendidikan. Lembaga pendidikan dari semua jenjang pendidikan mulai dari prasekolah, sekolah, sampai perguruan tinggi merupakan organisasi yang dalam operasionalnya membutuhkan uang untuk menggerakkan semua sumber daya yang dimiliknya. Oleh karena itu, sumber daya dan sumber dana yang ada perlu dikelola dengan baik untuk pencapaian tujuan pendidikan.

Dalam kaitannya dengan visi, misi dan strategi, dinas pendidikan nasional pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota harus dapat mempertimbangkan dengan bijkasana kondisi nyata sekolah dan mendukung kebijakan nasional yang menjadi prioritas pemerintah.. Hal ini sejalan dengan konsep lembaga pendidikan dasar yang telah dibentuk dalam manajemen sekolah untuk berkembang berdasarkan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS), yang merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi secara luas pada tingkat sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah lebih leluasa dalam mengelolah sumber dana agar dapat mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat (Mulyasa, 2009).

Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari "school based management" yang pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. Pada sistem MBS, sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber daya dan sumber dana, baik kepada masyarakat atau pemerintah (Mulyasa, 2009). Tujuan dari MBS adalah untuk meningkatkan kinerja sekolah melalui pemberian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata pengelolaan sekolah yang baik meliputi partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Kinerja sekolah meliputi peningkatan kualitas, efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan inovasi pendidikan. Dengan MBS, sekolah dapat meningkatkan kemampuannya dalam merencanakan, mengelola, membiayai, dan menyelenggarakan pendidikan disekolahnya, selain itu dapat memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya yang tersedia dan dapat meningkatkan kepedulian warga sekolah dan warga masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki (Rohiat, 2010). MBS yang ditawarkan sebagai bentuk operasional desentralisasi pendidikan akan memberikan wawasan baru terhadap sistem yang sedang berjalan. Hal ini diharapkan dapat membawa dampak terhadap peningkatan efisiensi, dan efektivitas kinerja sekolah, dengan menyediakan layanan pendidikan yang komprenshif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat sekolah setempat. Karakteristik MBS bisa diketahui dari bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses belajar-mengajar, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya dan administrasi (Mulyasa, 2009).

Menurut Mahsun (2009) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapain pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu organisasi. Kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Oleh karena itu, untuk mengetahui kinerja kelompok atau individu, terlebih dahulu harus ada kriteria keberhasilan yang ditetapkan sebelumnya. Kinerja keuangan pada sekolah terkait dengan bagaimana sekolah meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya. Masyarakat sebagai pembayar pajak sekaligus *stakeholder* pendidikan mengharapkan uang yang dibayarkan digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif serta memenuhi prinsip kinerja sektor publik (Mahmudi, 2010). Hal ini selaras dengan Undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 48 bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 "Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah" BOS adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM. Penyaluran BOS dilakukan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan), yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Bagi wilayah yang geografis sangat sulit dijangkau sehingga proses pengambilan BOS mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, maka atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyaluran BOS dilakukan setiap 6 (enam) bulan (semester), yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember (Muhadjir, 2018).

Penggunaan dana BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan BOS mengikutsertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah. Pengelolaan BOS dengan menggunakan MBS wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektif, akuntabel, dan transparan
- 2. Melakukan evaluasi setiap tahun
- 3. Menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatas Anggaran Sekolah (RKAS), dengan ketentuan:
 - a. RKJM disusun setiap 4 (empat) tahun;
 - b. RKJM, RKT, dan RKAS harus disusun berdasarkan hasil evaluasi dari sekolah;
 - c. RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS;
 - d. RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Sekolah merupakan organisasi yang mempunyai tugas utama memberikan layanan pendidikan bermutu kepada masyarakat. Terkait dengan layanan pendidikan tersebut, pemerintah telah menetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai dasar rujukan untuk mengukur kinerja sekolah. Oleh karena itu dengan memperhatikan berbagai pendapat para ahli tentang dimensi pengukuran kinerja organisasi, maka pengukuran kinerja sekolah dalam penelitian ini merujuk pada pengukuran kinerja sektor publik yang sesuai Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 19 Tahun 2005. Berdasarkan pengukuran kinerja sektor publik seperti sekolah yang ditinjau dari Tingkat Efisiensi dan Tingkat Efektivitas.

Menurut Mardiasmo (2004:4) Efisensi adalah pencapaian output yang maximum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu . Efisiensi merupakan perbandingan output/input, yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah di tetapkan. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang di tetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan output. Pengertian efektivitas umumnya berkaitan dengan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Ukuran kemampuan yang di maksud dapat bermacam-macam, tergantung pada sasaran atau tujuan yang ingin dicapai atau yang telah di tetapkan.

Pengertian efektivitas yang didefinisikan oleh Hans Kartikahadi dalam Agoes Sukirno (2000;180) adalah produk akhir suatu kegiatan operasi telah mencapai tujuannya baik di tinjau dari segi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja maupun batas waktu yang di targetkan. Sedangkan untuk Efisiensi di definisikan sebagai bertindak dengan cara yang dapat meminimalisir kerugian atau pemborosan sumberdaya dalam melaksanakan atau menghasilkan sesuatu. Sedangkan Ruchyat Kosasih dalam Agoes Sukirno (2000;185) mendefinisikan efektivitas sebagai "perbandingan masukan-keluaran dalam berbagai kegiatan ,sampai dengan pencapaian tujuan yang di tetapkan, baik di tinjau dari kuantitas (volume), hasil kerja, kualitas hasil kerja maupun batas waktu yang di targetkan". Dan Efisiensi sebagai "bertindak untuk membuat pengorbanan yang paling tepat di bandingkan dengan hasil yang di kehendaki". Suatu organisasi di anggap efektif, bila bisa mencapai tujuan dengan efisien, hemat dan mentaati peraturan yang berlaku. Pengukuran Efisiensi diukur dengan ratio antara output dengan input. Semakin besar output di banding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Mardiasmo 2004;133).

Di wilayah Lombok Timur khususnya di Kecamatan Pringgabaya Desa Pohgading, terdapat beberapa Sekolah Dasar Negeri yang favorit, dan salah satunya adalah Sekolah Dasar Negeri 2 Pohgading. Sumber dana yang didapatkan SDN 2 Pohgading berasal dari Pemerintah dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS merupakan kebijakan pendanaan pendidikan untuk menuntaskan kewajiban belajar bagi setiap anak agar dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar. Besaran dana yang didapat oleh SDN 2 Pohgading Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1 : Daftar Penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 2 Pohgading Periode 2014 - 2018

No	Tahun	Dana (Rp)	Naik (Turun)	
			Nominal (Rp)	Persentase (%)
1	2014	232.290.000	-	-
2	2015	328.960.000	96.670.000	41,6
3	2016	335.800.000	6.840.000	2,1
4	2017	336.480.000	680.000	0,2
5	2018	333.600.000	(2.880.000)	(0,9)
Jumlah		1.569.850.000	=	-
Rata-rata		313.970.000	-	-

Sumber: data primer diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel 1, Jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima SDN 2 Pohgading tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014-2017, persentase penerimaan dana BOS mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2017-2018 persentase penerimaan dana BOS mengalami penurunan. Dana BOS

yang didapatkan oleh sekolah berdasarkan pada jumlah peserta didik atau siswa yang ada dalam sekolah tersebut. Semakin banyak siswa yang terdapat dalam sekolah tersebut maka dana BOS yang diterima sekolah akan meningkat begitupun sebaliknya, semakin sedikit siswa yang terdapat dalam sekolah tersebut dana BOS yang akan diterima semakin berkurang atau menurun. Akan tetapi berkurangya dana BOS bisa juga disebabkan karena data jumlah siswa yang di SK-kan oleh tim manajemen BOS kabupaten atau kota tidak akurat atau tidak *update*, dan ada kesalahan input data sekolah di tingkat kabupaten/kota, atau input data di tingkat provinsi.

Beberapa peneliti terdahulu melakukan penelitian tentang kinerja keuangan sekolah seperti, Jaeni (2005) menyebutkan bahwa RAPBS selalu mengalami kenaikan 20% tiap tahun, dan kinerja evaluator belum maksimal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wagini (2016) menyatakan bahwa dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dengan lebih memperhatikan perhitungan dana yang masuk dan dana yang dikeluarkan. Ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan manajemen berbasis sekolah di SDIT'IQRA '1 kota Bengkulu sudah sangat baik.

Dari pemikiran di atas, Pengelolaan keuangan dalam pendidikan lebih difokuskan pada perencanaan alokasi dana secara teliti. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus disertai dengan bukti-bukti secara administrasi antara dana yang masuk dengan dana yang dikeluarkan. Dalam hal mengukur kinerja pengelolaan keuangan, harus secara profesional dengan teknik pengukuran kinerja sektor publik yang ditinjau dari tingkat efisien dan efektivitas. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimanakah tingkat efisiensi dan efektivitas untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan MBS di SDN 2 Pohgading Kabupaten Lombok Timur?".

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah "Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan MBS di SDN 2 Pohgding Kabupaten Lombok Timur".

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Dapat dijadikan sebagai informasi dasar bagi semua pihak, serta sebagai rekomendasi kepada pemerintah dalam melihat Tingkat Efisiensi Dan Efektifitas di SDN 2 Pohgading Kabupaten Lombok Timur.
- b. Dapat dijadikan acuan bagi semua pihak terkait dalam melihat Tingkat Efisiensi dan Efektivitas di SDN2 Pohgading Kabupaten Lombok Timur.

METODE PENELITIAN

Penenlitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau hubungan dengan variabel lain (Sugiyono 2012). Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang biasa berbentuk gambar ataupun tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan dan kebijakan (Sugiyono, 2014) sedangkan teknik wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jenis data yang digunakan peneliti adalah data kuantitatif dan data kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder.

Penelitian ini menggunakan variabel tunggal, yaitu kinerja pengelolaan keuangan manajemen berbasis sekolah, dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggaran belanja, anggaran pendapatan / penerimaan, realisasi belanja dan realisasi pendapatan. Teknik analisis data menggunaan teknik analisis deskriptif kuantitatif, yang dilakukan dengan cara mengevaluasi kinerja sekolah yang sumber datanya diperoleh dari laporan keuangan RKAS dan realisasi penggunaan dana BOS, disertai wawancara dengan bendahara sekolah. Adapun untuk mengetahui hasil kinerja sekolah dengan pengukuran kinerja sektor publik yang ditinjau dari :

1. Tingkat Efisiensi

Dengan formula sebagai berikut:

Efisiensi =
$$\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\% \cdots (1)$$

Kriteria penilaian efisiensi kinerja keuangan menurut Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1994 dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2 : Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria	
100 – keatas	Tidak efisien	
90-100	Kurang efisien	
80-90	Cukup efisien	
60-80	Efisien	
Dibawah 60	Sangat efisien	

2. Tingkat Efektivitas

Dengan formula sebagai berikut:

Efektivitas =
$$\frac{\text{Realisasi Penerimaaan}}{\text{Anggaran Penerimaan}} \times 100\% \dots (2)$$

Kriteria penilaian efektivitas kinerja keuangan menurut Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1994 dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3: Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria	
100 – keatas	Sangat efektif	
90-100	Efektif	
80-90	Cukup efektif	
60-80	Kurang efektif	
Dibawah 60	Tidak efektif	

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis:

1. Hasil analisis data Tingkat Efisiensi SDN 2 Pohgading Tahun 2014-2018

Tabel 4: Perbandingan Realisasi Penerimaan dan Realisasi Biaya Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Penerimaan	Realisasi Biaya	Capaian Tingkat
	(Rp)	(Rp)	Efisiensi (%)
2014	232,290,000	232,290,000	100
2015	328,960,000	328,960,000	100
2016	335.800.000	335.800.000	100
2017	336,480,000	336,480,000	100
2018	333,600,000	333,600,000	100

Sumber: data sekunder (diolah)

2. Hasil analisis data Tingkat Efektivitas SDN 2 Pohgading Tahun 2014-2018

Tabel 5: Perbandingan Rencana Penerimaan dan Realisasi Penerimaan Tahun 2014-2018

Tahun	Rencana Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Capaian Tingkat
	(Rp)	(Rp)	Efektivitas (%)
2014	226.780.000	232.290.000	102,43
2015	328.960.000	328.960.000	100
2016	335.180.000	335.800.000	100,18
2017	339.200.000	336.480.000	99,20
2018	333.600.000	333.600.000	100

Sumber: data sekunder (diolah)

Pembahasan:

SDN 2 Pohgading Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu Sekolah Dasar Negeri favorit yang termasuk dalam kategori organisasi publik, Hal ini dapat dipahami, karena sumber utama pendapatan sekolah sebagai organisasi publik adalah dana dari pemerintah yang berasal dari dana APBN atau APBD. Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik seperti sekolah khususnya di sekolah negeri, dana yang didapatkan dalam

bentuk dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) harus dikelola secara efektif dan efisien. Berdasarkan analisis tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan SDN 2 Pohgading Kabupaten Lombok Timur didapatkan hasil sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ditinjau dari Tingkat Efisiensi

Berdasarkan hasil analisis perhitungan tingkat efisiensi keuangan SDN 2 Pohgading Kabupaten Lombok Timur, dari data realisasi penerimaan dan realisasi biaya pada tahun 2014-2018 persentase pencapaiannya sebesar 100% yang dalam kriteria penilaian kinerja keuangan dikatakan kurang efisien atau dapat juga dikategorikan efisien berimbang karena persentasinya mencapai 100%. Artinya SDN 2 Pohgading Kabupaten Lombok Timur selama tahun penelitian 2014 - 2018 menggunakan dana BOS secara maksimal untuk mendukung kegiatan rutinitas sekolah. Selain itu yang menyebabkan kurang efisiensinya dalam proses penganggaran sekolah karena SDN 2 Pohgading Kabupaten Lombok Timur tidak memiliki Rencana Jangka Menengah (RJM) yang terkait dengan beberapa hal yang akan dicapai oleh sekolah dalam rentang waktu 4 tahun kedepan.

Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ditinjau dari Tingkat Efektivitas

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas keuangan SDN 2 Pohgading Kabupaten Lombok Timur, dari data rencana penerimaan dan realisasi penerimaan pada tahun 2014 dan 2016 sebesar 101,20%, dan 100,18%, yang menunjukkan bahwa dalam kriteria penilaian kinerja dikategorikan sangat efektif karena persentase pencapaiannya lebih dari 100%. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2018 tingkat efektifitasnya mencapai 100% dan tahun 2017 tingkat efektivitasya sebesar 99,20%, ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015, 2017 dan 2018 SDN 2 Pohgading Kabupaten Lombok Timur memiliki kinerja keuangannya yang efektif sesuai dengan kreteria penilaian. Hal ini berarti SDN 2 Pohgading Kabupaten Lombok Timur sudah menjalankan program sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dengan baik, selain itu jumlah penerimaan dana BOS sudah sesuai dengan yang direncanakan. Artinya siswa yang mendaftar sebagai peserta didik mengalami peningkatan selama tahun 2014 – 2016. tetapi di tahun 2017 dan 2018 SDN 2 Pohgading Kabupaten Lombok Timur mengalami penurunan dalam penerimaan siswa baru sehingga akan berdampak pada menurunnya penerimaan dana BOS yang akan diterima oleh sekolah. Dengan demikian bertambahnya peserta siswa baru akan berdampak pada meningkatnya dana BOS, begitu pula sebaliknya.

PENUTUP

Simpulan

Kinerja pengelolaan keuangan Manajemen Berbasis Sekolah di SDN 2 Pohgading Lombok Timur, dalam bentuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dikatakan sudah baik, walaupun dengan hasil efisiensi yang berimbang tetapi sangat efektif, karena sudah sesuai dengan buku petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah, dimana didalam buku tersebut terdapat peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh masing-masing sekolah mengenai penggunaan dana dan realisasinya. Sehingga setiap dana yang digunakan sebagaimana mestinya karena setiap pemakaian dana sekecil apapun harus dipertanggungjawabkan.

Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

- 1. Untuk sekolah diharapkan supaya membuat Rencana Jangka Menengah (RJM) terkait dengan hal-hal yang akan dicapai dalam rentang waktu 4 tahun dan menjalin komunikasi yang baik dan kerja sama antara pihak sekolah (pengelola BOS) dengan *stakeholders*.
- 2. Walaupun ada dana dari pemerintah diharapkan masyarakat tidak berkurang dalam berperan serta untuk mendukung pendidikan, karena pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua peserta didik.
- 3. Dari hasil penelitian masih perlunya dikaji lebih lanjut dengan lebih mendalam, karena mengingat penelitian yang dilakukan dengan berbagai keterbatasan, baik keterbatasan waktu maupun data yang dikumpulkan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam yang berkaitan dengan Kinerja Pengelolaan Keuangan Manajemen Berbasis Sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukirno. (2000). *Auditing*, Edisi kedua, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jilid I, Jakarta Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Dinas pendidikan dan kebudayaan. (2018), Petunjuk Teknis Pertanggungjawaban Dana BOS SD dan SMP sekabupaten Lombok Timur

Engkosawara. (2011). Paradigma Manajemen Pendidikan. Bandung: Yayasan Amal Keluarga

Imam, Ghozali, (2013). Desain Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. Semarang: Yoga Pratama

Jaeni, Muhammad. (2005). Pola manajemen keuangan berbasis sekolah dan hubungannya dengan kinerja sekolah di SMP negeri 1,5, dan 8 Yogyakarta. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, Vol.7 No.1

Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994

Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Mahsun, Mohamad. (2009). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Mardiasmo. (2004). Efisiensi dan Efektifitas, penerbit Andy Jakarta

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV Andi Offiset.

Muhadjir, Effendy. (2018). "Petunjuk Teknis Dana Bantuan Operasional Sekolah". Jakarta

Muhajirin. (2012). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Bersumber dari Partisipasi Masyarakat. *Educational Management Journal*, Vol. 1 No. 2

Muhammad, Fadel. (2010). Reinventing Local Government: Pengalaman dari Daerah. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Muhroji. (2012). Anggaran dan Pengukuran Kinerja Sekolah (SMU). Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol 22, No. 1

Mulyasa, (2009). Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Mulyasa, (2009). Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Musfiqon. (2012). Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya.

Nurlan Darise. (2009). Pengelolaan keuangan Daerah Edisi ke-2. Jakarta: Indeks.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Pramono, Joko (2014). *Analisis Pengukuran Kinerja Manajemen Berbasis Sekolah Dengan Pendekatan Balanced Scorecard di SMK Negeri 6 Surakarta*. Unpublished Tesis S2. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Rahajeng, Devani. (2018). Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Pendekatan Value For Money (Studi Kasus Di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman). Skripsi Pada Fakultas ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) http://cintailmu22.blogspot.com/. Diakses pada hari rabu, 02 November 2016 jam 15.00 WITA

Rohiat, (2010). Manajemen Sekolah. Bandung: PT Refika Aditama.

Rudianto. (2013). Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis. Jakarta: Erlangga

Soiran, Suyono. (2014). *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*. Skripsi Pada Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo.

Sudarti, Sri. (2018). *Kinerja Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) MA Negeri Dan Swasta Di Kabupaten Kendal.* Skripsi Pada Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sulistyowati, Ida. (2015). Pengukuran Kinerja Berbasis Value For Money Studi Pada SMP Negeri 2 Banjarnegara. *Jurnal Kajian Bisnis* Vol. 23, No.1

Suyatno, dkk. (2017). Implementasi Balanced Scorecard Dalam Peguuran Kinerja Manajemen Berbasis Sekolah. *Educational Management* 6 (1) 53-62.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Wagini, Rahim. (2016). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Manajemen Berbasis Sekolah Di SDIT'IQRO 1 Bengkulu. *Jurnal Penelitian Baabu Al-Ilmi*, Vol.1 No.1.

Wijaya, David. (2009). Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan. Jurnal Pendidikan Penabur, No 13 Tahun ke 80-96.